

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Bahwa letak geografis Indonesia berada tepat di Garis Katulistiwa, sebuah Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 258 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang berjumlah 207 juta jiwa. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu menjalankan pemerintahan republik presidensial multi partai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Haryanto, 2015: 88).

Selain itu, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pemerintahan Indonesia membuat penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan keyakinan bahwa mutu hasil/ output akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan Standar

Mutu Pendidikan di Indonesia, yaitu menggunakan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu, demi menjamin standarisasi mutu pendidikan di Indonesia pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang melakukan pengawasan dan penelitian akan pelaksanaan usaha dalam mencapai mutu pendidikan (Widodo, <http://staffnew.uny.ac.id>).

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengalami beberapa periode semenjak datangnya Islam di tanah Nusantara. Yang *pertama*, periode pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. *Kedua*, periode pendidikan Islam pada penjajahan Belanda. *Ketiga*, periode pendidikan Islam pada penjajahan Jepang. *Keempat*, periode pendidikan Islam pada zaman orde lama. *Kelima*, pendidikan Islam pada zaman orde baru. *Keenam*, pendidikan Islam pada zaman reformasi (Nata, 2014: 235-360).

a. Periode pendidikan Islam di Indonesia

1) Periode pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia.

Sebelum abad ke-13 Islam sudah masuk ke Indonesia. Tetapi pada setelah itu Islam mulai masuk sebagai gerakan dakwah dan pendidikan di Indonesia mulai pada abad ke-13 M. Diketahui dengan adanya keberadaan kerajaan Islam pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 M sampai abad ke-17. Hal ini terjadi dikarenakan dengan masuk Islamnya Alaudin (1591-1636) dan diangkat sebagai sultan pertama

kerajaan Gowa Tallo pada tahun 1605 M (Nata, 2014: 271). Selain itu, kerajaan Islam mempunyai peran penting dalam proses Islamisasi yaitu melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, melalui saluran tasawuf, melalui kesenian dan melalui pendidikan. Meningkatnya aktivitas perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 M, membuat pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia dan India ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut, sehingga proses Islamisasi pada jalur perdagangan sangat besar (Nata, 2014: 260-263).

Pendidikan sangat penting untuk menanamkan dan membudayakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan di masyarakat. Dengan adanya pendidikan sangat membantu dalam proses pengislaman yang dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tingkat anak-anak hingga dewasa. Dengan ini pendidikan merupakan media yang paling strategis dan signifikan untuk gerakan dakwah bagi masyarakat. Walaupun sistem pendidikan Islam pada zaman kerajaan Islam masih konvensional, informal dan nonformal, namun hal ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan adanya pendidikan Islam pada zaman kerajaan Islam lahirlah sejumlah ulama-ulama besar di Indonesia (Nata, 2014: 272-273).

2) Periode pendidikan Islam pada penjajahan Belanda.

Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan demi kemakmuran negaranya. Tetapi, setelah mereka mendapat keuntungan mereka melanjutkan dengan tujuan politik dan menyebarkan agama Kristen. Selanjutnya kedatangan Belanda dengan tujuannya dapat dirumuskan dalam tiga G, yaitu *Gold* (emas/ekonomi), *Glorius* (kekuasaan/kejayaan negara), *Gospel* (gereja/agama Kristen) (Nata, 2014: 275-278).

Keadaan pendidikan Islam pada penjajahan Belanda pada umumnya sangat memprihatinkan, karena akibat dari kebijakan pemerintah Belanda yang sangat diskriminatif. Dengan ini, menurut Nata (2014: 297) kehadiran Belanda menimbulkan tiga respon yang berbeda, yaitu:

- a) Respon non-kooperatif, yakni menjauhi, memusuhi, dan membenci Belanda. Upaya yang dilakukan yaitu melarang meniru budaya Belanda serta mengharamkan segala sesuatu yang berbau Belanda. Respon non-kooperatif ini dilakukan oleh kalangan agama yang lembaga pendidikannya berbasis pesantren.
- b) Respon kooperatif, yaitu sikap menerima dan akomodatif dengan cara yang selektif dan proposional, yakni dengan menerima hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari Belanda. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara

mendirikan madrasah menggunakan sistem Belanda, tetapi dengan jiwa agama dan kebangsaan.

- c) Respon menerima sepenuhnya, respon ini bagi mereka yang kuaramn memiliki dasar agama yang kuat dan mudah dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya Belanda.

Maka dari itu pendidikan pada zaman Belanda, sebagian besar pendidikannya dalam bentuk pesantren tradisional yang kurang memerhatikan ilmu modern dan keduniaan. Selain itu terdapat sebagian kecil dalam bentuk madrasah yang sudah menerapkan model dan sistem pendidikan Balanda. Jadi, pada zaman tersebut jumlah lembaga pendidikan tradisional lebih banyak daripada lembaga pendidikan madrasah (Nata, 2014: 298).

- 3) Periode pendidikan Islam pada penjajahan Jepang di Indonesia.

Pada periode ini Jepang mempunyai tujuan datang ke Indonesia untuk mendapatkan dukungan politik, sumberdaya manusia dan logistik yang dibutuhkan. Tetapi tujuan Jepang dapat dinilai tidak tercapai karena sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan, Jepang harus kembali ke negaranya yang diinvasi oleh Amerika dan sekutunya. Oleh sebab itu Jepang menjajah Indonesia terhitung singkat yaitu 3,5 tahun. Walau masa penjajahan Jepang sangat singkat, mereka memberikan pengaruh terhadap pengembangan pendidikan Islam.

Keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Jepang tidak jauh beda dengan keadaan sistem pendidikan di zaman Belanda. Yang membedakan adalah sistem pendidikan Islam di zaman Jepang lebih leluasa dalam melakukan segala aktivitas pendidikan Islam dibandingkan pendidikan zaman Belanda. Selain memberi kerugian terhadap umat Islam, Jepang juga memberi berbagai pengalaman dalam berorganisasi, militer dan lain sebagainya, hal ini sangat bermanfaat bagi kemajuan umat Islam di masa selanjutnya (Nata, 2014: 308-309).

4) Periode pendidikan Islam pada Orde Lama di Indonesia

Periode Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai digantikan presiden Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret tahun 1965 yang dikenal sebagai Supersemar (Nata, 2014: 313). Pendidikan Islam pada zaman Orde Lama belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya perang ideologis politis dari sebagian elite Islam, dengan ini menimbulkan kecurigaan dari pemerintah terhadap umat Islam. Namun terdapat sebagian elite Muslim yang mempunyai pandangan progresif, modern dan nasionalis, yang mana elite Muslim ini sebagaian telah tersentuh oleh pendidikan dan

pengalaman dunia modern dapat melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Sehingga pemerintahan Orde Lama melakukan usaha-usaha terhadap kepentingan pendidikan Islam.

Adanya usaha pemerintah Orde Lama, maka pendidikan Islam pada zaman Orde Lama jauh berbeda dengan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman Orde Lama tidak hanya diajarkan di madrasah dan pesantren saja, melainkan sudah diajarkan pada sekolah umum. Hal ini atas keputusan bersama antara kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Nata, 2014: 318).

5) Periode pendidikan Islam pada zama Orde Baru di Indonesia

Zaman Orde Baru adalah masa yang baru menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Pada zaman ini merupakan perbaikan dari kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, yaitu meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini mengakibatkan terjadinya tragedi nasional yang merugikan masyarakat. Maka dari itu, Orde baru ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur derdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Nata, 2014: 340).

Pendidikan Islam pada zaman Orde Baru lebih berkembang dari pada pendidikan Islam pada zaman Orde

Lama. Karena, pada zaman Orde Baru pendidikan Islam telah masuk dalam pendidikan nasional. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan pemerintah. Selain itu, dalam sistem pendidikan Islam, khususnya madrasah, pesantren dan sekolah telah diperbarui dalam segi aspek sistem pendidikannya baik fisik atau non fisik, pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen pengelolaan, dan sumberdaya manusia (Nata, 2014: 341).

6) Periode pendidikan Islam pada zaman reformasi

Zaman reformasi merupakan zaman mengatur dan menertibkan pemerintahan Indonesia setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Dalam zaman reformasi ini terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbarui sistem pemerintahan di Indonesia khususnya pada pendidikan Islam. Sejalan dengan berbagai kebijakan pendidikan selepas zaman Orde Baru, hal ini menimbulkan pendidikan Islam jauh lebih baik dari pada pemerintahan zaman Orde Baru (Nata, 2014:347).

Pemerintahan pada zaman reformasi melahirkan beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan, yang mana kebijakan ini membawa pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Upaya untuk pemantapan pendidikan Islam dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan

penyempurnaan Undang-Undang. Pada kebijakan tentang pembaruan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bahwasannya pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan madrasah saja yang masuk dalam sitem pendidikan nasional, maka pada pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk dalam pendidikan nasional tidak hanya madrasah saja melainkan pesantren, ma'had Ali, Raudhatul athfal, dan majlis taklim, termasuk dalam pendidikan nasional (Nata, 2014: 352).

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka kebijakan yang lain dibuat untuk perbaikan dan kesejahteraan dalam pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru (Nata, 2014: 352-353).

b. Pendidikan guru agama Islam di Indonesia

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia sejumlah elit Muslim di pemerintahan memperjuangkan pengembangan pendidikan Islam. Hal ini membuahkan hasil dalam pendidikan Islam. Setelah terbentuknya Panitia Penyelidik Pengajaran yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1946, mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 2

Juli 1946 sebagai berikut, “pendidikan agama diangkat oleh Departemen Agama, dan guru diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum ...” (Kosim, 2007: 181).

Untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Panitia Penyelidik Pengajaran pada tanggal 1 Januari 1947 Departemen Agama merancang pengadaan guru. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Departemen Agama yaitu langkah jangka panjang dan jangka pendek (Mubarok, 2014: 234), sebagai berikut:

- 1) Jangka pendek, langkah yang diambil pada jangka pendek yaitu menyelenggarakan pendidikan atau kursus singkat dengan melatih 90 orang calon guru Agama selama 2 Minggu. Bagi yang lulus diangkat pertama sebagai guru agama di Depag yang bertugas mengajar di sekolah rakyat negeri di seluruh Jawa dan Madura.
- 2) Jangka panjang, langkah yang diambil yaitu membuka atau mendirikan pendidikan khusus yang menyiapkan guru Agama.

Untuk merealisasikan jangka panjang tersebut maka pada tanggal 16 Mei 1948 Departemen Agama mulai merintis pendirian sekolah guru yang diawali dengan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI). Sesuai dengan namanya SGHAI mempunyai dua misi ganda yaitu bukan hanya mempersiapkan calon guru agama saja, melainkan juga mencetak calon pegawai pengadilan agama. Hal ini disebabkan karena pada masa itu Departemen Agama belum

memungkinkan mendirikan lembaga terpisah karena kondisi negara yang belum stabil. Kondisi ini disebabkan adanya agresi militer Belanda pertama pada tahun 21 Juli 1947 dan kedua pada tahun 19 Desember 1948. Selain itu terdapat gangguan dari dalam yaitu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 (Kosim, 2007: 182-183).

Sebelum pemerintah mendirikan SGHAI, umat Islam telah mendirikan beberapa lembaga sekolah agama. Diantara lembaga sekolah agama tersebut yaitu Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI), ormas Islam yaitu al-Irsyad, Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama serta kelompok umat Islam lainnya. Pada periode selanjutnya Departemen Agama terus mengembangkan dan memperbaiki pendirian sekolah guru. Upaya ini dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang program wajib belajar di sekolah dasar. Dengan ini, kebutuhan guru agama juga meningkat, sehingga Departemen Agama berupaya meningkatkan pengadaan guru agama melalui penyempurnaan SGHAI dan mendirikan lembaga baru yang bernama Sekolah Guru Agama Islam (SGAI).

SGHAI dan SGAI hanya didirikan di daerah Ibu Kota Yogyakarta. Menteri agama menganjurkan untuk mendirikan dua lembaga guru tersebut di setiap karesidenan setelah Kementerian Agama RI di Yogyakarta digabung dengan Kementerian Agama RIS di Jakarta. Setelah pemerintah RI pindah ke Jakarta, pada tahun 1951

Departemen Agama memperluas keberadaan lembaga-lembaga dengan sedikit perubahan yaitu nama SGAI diganti menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan nama SGHAI dipindah menjadi SGHA (Sekolah Guru dan Hakim) (Kosim, 2007: 183-184).

Pada tahun 1952-1958, periode ini disebut masa itegrasi. Karena dua jenis sekolah yaitu SGAI dan SGHA diintegrasikan menjadi satu yaitu, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Dengan konsep tersebut menjadikan lembaga pendidikan guru dibawah naungan Departemen Agama lebih sederhana. Adapun kelemahan dengan rencana tersebut yaitu pendidikan calon guru agama untuk madrasah dan sekplah umum tidak lagi dibedakan yakni dipersiapkan melalui PGA dengan kurikulum yang sama. Untuk penghapusan SGHA, tidak lagi disiapkan oleh Departemen Agama sehingga program ini dipandang merugikan, karena akan mempersempit garapan Departemen Agama. Setelah dilakukan intregasi, dengan ini pemerintah memperluas keberadaan PGAN. Pada masa pembinaan ini, terdapat kebijakan yang mempengaruhi perkembangan PGA yaitu keluarnya TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini ketetapan yang dinyatakan; "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri" (Kosim, 2007: 190-191).

Pada tahun 1978-1992, masa tersebut disebut dengan masa reorganisasi dan alih fungsi. Karena pada masa tersebut Departemen Agama melakukan penataan kembali terhadap PGAN 6 tahun, yaitu: kelas 1, 2, 3 PGA menjadi Madrasah Tsanawiyah, sedangkan kelas 4,5,6 menjadi PGA (Kosim, 2007: 193). Namun pada tahun 1992, pemerintah melakukan alih fungsi PGAN 3 tahun menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992. Alih fungsi ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3, yang menyatakan bahwa “Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan”. Bahwa lembaga pendidikan tenaga keguruan menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan pasal 14 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan tenaga keguruan dalam ayat ini adalah Fakultas Tarbiyah atau satuan pendidikan sejenis.” Dengan demikian, pengadaan tenaga guru tidak lagi disiapkan melalui pendidikan jenjang menengah melainkan melalui perguruan tinggi. Khusus calon guru agama Islam, maka lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) menyiapkan Fakultas Tarbiyah di perguruan tinggi agama Islam (Kosim, 2007: 195-196).

Sejalan dengan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak saja pada pendidikan guru. Pemerintah juga memperhatikan dan mengupayakan pengadaan pembinaan atau pelatihan bagi guru dalam jabatan agar menjadi guru yang profesional. Salah satu upaya pemerintah yaitu Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 5 yang berisi tentang pendidikan nonformal, memaparkan bahwa diselenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri dan profesi. Dengan pengembangan pendidikan dan upaya pemerintah tersebut maka adanya beberapa keputusan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional, salah satunya yaitu keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan pada tanggal 13 April 2009.

2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia

Bahwa jumlah penduduk Malaysia saat ini lebih dari 27 juta jiwa yang terdiri dari mayoritas penduduk pribumi (Melayu), keturunan Cina di urutan kedua, dan keturunan India (Tamil). Sedangkan Luas wilayah negara ini 332.370 km² atau sekitar 2,5 kali luas pulau Jawa. Adapun sistem negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agong, jabatan raja yang dipilih setiap lima tahun sekali di Malaysia. Dapat menjabat

dan berhak dipilih sebagai raja itu adalah para sultan di 13 negara bagian.

Menurut Griya Maya Faiq (2007), pada zaman tahun 1970-an sampai tahun 1980-an keadaan pendidikan di Malaysia masih tertinggal dibandingkan dengan di Indonesia. Banyak pemuda Malaysia datang ke Indonesia untuk menempuh pembelajaran di Indonesia. Bahkan beberapa guru dari Indonesia diperbantukan mengajar di Malaysia. Namun, Sekarang pendidikan di Malaysia termasuk menjadi salah satu pendidikan terbaik di Asia (<https://datakata.wordpress.com>).

Selain itu, untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. Pemerintahan Malaysia membuat penjaminan mutu pendidikan di Malaysia. Penjaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk memberikan keyakinan bahwa mutu hasil/ output akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Dengan ini, Negara Malaysia berkeinginan untuk menjadikan pendidikannya *go International*. Sebagai buktinya Kementerian Pelajaran Malaysia menuangkan rumusan misi utama yaitu, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, disamping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia” (Widodo, <http://staffnew.uny.ac.id>).

Pendidikan Malaysia mengalami kemajuan. Pada awal abad ke-21, terdapat beberapa perubahan dan perkembangan dalam Sistem

Pendidikan Malaysia telah berlaku. Hal ini disebabkan oleh globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan teknologi dan komunikasi. Bahwa ekspektasi Malaysia saat ini dalam menghadapi persaingan negara lain yaitu untuk membangun ekonomi berasaskan pengetahuan atau ketrampilan (Widodo, <http://staffnew.uny.ac.id>). Kurikulum pendidikan Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Bahwa kurikulum sekolah di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) menjadi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Widodo, <http://staffnew.uny.ac.id>).

Selain itu, sejarah pendidikan Islam di Malaysia mengalami tiga periode yaitu, *Pertama*, masa masuknya Islam di tanah Melayu sampai datangnya bangsa kolonial. *Kedua*, pendidikan Islam masa penjajahan kolonial Inggris. *Ketiga*, pendidikan Islam masa pasca kemerdekaan sampai sekarang (Haryanto, 2015: 85).

a. Periode pendidikan Islam di Malaysia

1) Periode pendidikan Islam pada masa masuknya Islam di Melayu

Bahwa perkembangan pendidikan Islam di Malaysia belum bisa dipastikan keberadaannya. Tetapi seiring datangnya Islam di tanah Melayu pada abad ke-14, pada saat itu mulai pendidikan Islam. Pendidikan Islam di tanah Melayu dibuktikan

dengan fakta sejarah raja Malaka pertama bernama Parameswara yang memeluk agama Islam pada tahun 1414 M yang dikenal dengan Megat Iskandar Syah, sejak itulah pendidikan Islam mulai di tanah Melayu (Roslan dalam Haryanto, 2015: 86).

Perkembangan Islam tidak hanya disitu saja. Melainkan dengan memeluknya agama Islam oleh raja Malaka, semua pembesar kerajaan dan rakyatnya mengikuti jejak keislaman raja Malaka. Untuk memahami agama Islam lebih dalam, baginda belajar dengan para ulama dan pendakwah yang datang di tanah Malaka (Nor, 2011: 66). Perkembangan Islam di Malaka mulai maju, karena pemerintahan Malaka mendukung dan ikut serta dalam menggalakkan rakyat agar mengikuti semua ajaran-ajaran atau amalan agama Islam (Ishaq dalam Nor, 2011: 67).

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, para pembesar kerajaan mengadakan pengajian diberbagai institusi yaitu di rumah, masjid dan istana. Sistem pendidikan Islam yang dipelajari pada waktu itu adalah kelas mengaji Al-Qur'an. Selain itu juga untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Qur'an, mereka mulai diperkenalkan dan belajar huruf jawi. Huruf Jawi merupakan huruf Arab campuran Parsi yang dipadukan menjadi satu bahasa meliputi seluruh golongan Melayu (Ishaq dalam Nor, 2011: 67-68)

2) Periode pendidikan Islam pada penjajahan Inggris di Malaysia

Bangsa Melayu mulai memasuki zaman kegelapan pada tahun 1511 M ketika bangsa Barat menjajah di Tanah Melayu. Jatuhnya Malaka di tangan Inggris, mengakibatkan rusak dan menurunnnya bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan agama. Selain itu, tujuan mereka di Melayu khususnya di Malaka ingin menjatuhkan atau menghambat penyebaran agama Islam dan pendidikan Islam. Dengan ini tujuan bangsa kolonial Inggris atas motif politik dan ekonomi serta menyebarkan fahaman Kristian terhadap penduduk Melayu walupun upaya penjajah tidak berhasil (Jelani dalam Nor, 2011 : 68).

Pendidikan Islam pada masa penjajahan begitu memprihatinkan. Hal ini diketahui terdapat pendapat bahwa kegiatan pendidikan Islam dan syiar Islam dijalankan dengan cara diam-diam, untuk menghindari ancaman larangan dari penjajah. Tetapi, pada tahun 1854 sekoalah al-Qur'an yang berbentuk pondok diambil alih oleh pemerintah Inggris. Sekolah agama akan dapat bantuan dari pemerintah apabila memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung selain memberi mata pelajaran agama dan al-Qur'an. Ketika pagi hari bangunan sekolah digunakan untuk sekolah Melayu yang dibiayai oleh pemerintahan Inggris dan sekolah al-Qur'an dilaksanakan pada sore hari di tempat yang sama. Beberapa waktu kemudian,

pendidikan Islam semakin berkembang dengan adanya pelajar yang sudah lebih berpengalaman dalam pembaharuan pandangan terhadap Islam. Dengan ini lembaga pendidikan yang berbentuk pondok dengan memanfaatkan tempat belajar di Masjid berkembang menjadi Madrasah (Haryanto, 2015: 86-87).

3) Periode pendidikan Islam masa pasca kemerdekaan Malaysia.

Pendidikan Islam masa pasca kemerdekaan pada tahun 1960 M lebih berkembang dari pada sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Undang-undang Pendidikan pada tahun 1961 mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan menyediakan Pendidikan Islam, anggaran biaya Pendidikan Islam akan ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Setelah itu pada tahun 1962 diberlakukan ketentuan jam pelajaran pendidikan Agama Islam selama 120 menit dalam seminggu dan diberikan kepada siswa dan siswi selama sebelas tahun sekolah (Haryanto, 2015: 88).

Tahun 1967 sebuah komite dibentuk yang terdiri dari wakil Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi Islam, dan sekolah-sekolah Agama Kerajaan Negeri untuk membuat bahan ajar pendidikan Agama Islam. Bahan pelajaran Agama Islam dilaksanakan pada tahun 1968, dan isi pelajaran sesuai dengan tahap kemampuan berfikir dan tahap usia mereka. Selain itu, mata pelajaran agama Islam diperkuat lagi dengan program j-

QAF. J-QAF merupakan singkatan dari jawi, al-Qur'an, bahasa Arab dan fardlu 'ain, program ini bertujuan untuk memastikan siswa lebih memperkuat jawi, khatam al-Qur'an pada sekolah rendah dan belajar bahasa Arab serta memantapkan amalan dan penghayatan ibadah (Haryanto, 2015: 88).

b. Pendidikan guru agama Islam di Malaysia

Tahun 1980, Islam di Malaysia semakin berkembang dan mengalami kebangkitan yang ditandai dengan kegiatan dakwah dan kajian Islam. Kegiatan ini mencerminkan semaraknya aktivitas dalam mengembangkan pendidikan Islam. Selain itu, pada dasarnya Malaysia mengadopsi sistem pendidikan dari negara Inggris. Hal ini yang menyebabkan pendidikan Malaysia semakin maju. Hal ini dibuktikan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai berikut, "Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia". Sejalan dengan misi tersebut pemerintahan Malaysia berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi demi memajukan pendidikan Islam (Aslindah, 2015: 18).

Beberapa perguruan tinggi di Malaysia yang membuka *Islamic Studies* yaitu IPTA dan IPTS, selain IPTA dan IPTS terdapat beberapa perguruan tinggi lain didirikan yaitu, IIUM, UM, UKM, UUM, UPSI, USM, KUIS (Aslindah, 2015: 19). Pemerintah

Malaysia juga memperhatikan pendidikan bagi guru, adapun bagian yang menangani pendidikan bagi guru yaitu Bahagian Pendidikan Guru (BPG). BPG mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan tujuannya, visi BPG yaitu “Mencapai sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti yang dapat memenuhi aspirasi negara Malaysia”. Sedangkan misi BPG yaitu “Melaksana sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia untuk memastikan agar guru-guru sentiasa berketerampilan bagi memenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia” (<http://www.waktusolat.net>).

BPG bersama dengan lembaga pendidikan yang lain yaitu Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan latihan perguruan untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar. Pengadaan ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang berkualitas tinggi, dengan tiga aspek utama yang ditekankan yaitu nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran di kelas (<https://www.coursehero.com>).

B. Guru Pendidikan Agama Islam

Istilah yang sering digunakan oleh para sarjana islam mengenai guru dalam perspektif Islam, “Guru atau pendidik ialah *murabbi*, *muallim*, *muaddib*, *ustaz*, *mudarris*, *mursyid* atau ulama”(Noriati *et al.*, 2014: 99). Semua istilah-istilah yang digunakan merupakan Bahasa Arab. Istilah-istilah

tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu memberi pengajaran dan pendidikan terhadap peserta didik.

Menurut Rashid *et al.*, (2014: 99-100), perkataan *murabbi* dan *muallim* mempunyai perbedaan maksud. “Yang dimaksud dengan perkataan *muallim* yaitu seorang *muallim* lebih menumpukan kepada ilmu akal atau lebih kepada memberikan atau mengajarkan suatu ilmu saja, sedangkan *murabbi* memiliki maksud yang lebih luas melebihi *muallim*.” Hal ini menjelaskan bahwa *Murabbi* kembali kepada guru yang bukan saja mengajarkan suatu ilmu saja, melainkan dalam satu waktu seorang *murabbi* mereka mencoba untuk mendidik rohani, jasmani dan mental peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari oleh peserta didik sehingga ilmu yang diajarkan oleh guru dapat diamalkan dan bermanfaat bagi peserta didik serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang mengajarkan suatu ilmu bahkan melebihi dari mengajarkan ilmu, melainkan seorang yang mencoba untuk mendidik rohani, jasmani dan mental peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari peserta didik. Selain itu seorang Guru Agama Islam dapat memenuhi tujuan pendidikan Islam itu sendiri, agar pendidikan agama Islam dapat lebih berkemajuan serta bermanfaat bagi umat muslim dan negara. Adapun beberapa tujuan pendidikan yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan, sebagai berikut:

Khurshid Ahmad (1975) dalam Salleh (1997: 40), menyatakan bahwa;

Tujuan dasar pendidikan Islam dalam rangka kebudayaan Islam ialah untuk melaksanakan segala tugas-tugas kenabian yang berfungsi mendidik manusia dalam agama Islam, membekalkan mereka dengan semangat dan idealisme agama dan menjadikan mereka untuk hidup yang lebih matang.

Nadiat Jamaluddin (1983) memetik pendapat ikhwan as-Safa dalam Salleh (1997: 40) yang menyatakan tujuan pendidikan secara umum ialah “kearah perubahan menuju pembaharuan terhadap persekitaran manusia, terdapat perubahan dari segi ekonomi, kemasyarakatan, serta perubahan dan pembaharuan dari sudut akhlak”. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar pendidikan agama Islam ialah mendidik manusia dan memberi bekal dengan semangat dan idealisme agama yang tinggi dan menjadikan hidup yang lebih matang sehingga dapat membawa perubahan menuju pembaharuan dari segi ekonomi, kemasyarakatan, serta perubahan dan pembaharuan akhlak mulia.

C. Profesionalisme Guru Sekolah Menengah

Menurut Sanusi et.al dalam Saud (2009: 6-8), membahas tentang profesi dapat melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, antara lain; profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, profesionalitas. Berikut ini penjelasan kelima istilah tersebut; *Profesi* merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dalam pekerjaannya. Dengan kata lain profesi menunjuk pada tanggung jawab, kesetiaan serta keahlian terhadap pekerjaannya. *Professional* merupakan orang yang menyandang suatu profesi yang sesuai dengan profesinya. *Professionalisme* merupakan komitmen para anggota yang menyandang sebuah profesi untuk meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan profesionalnya terus-menerus yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. *Profesionalitas* merupakan sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. *Profesionalisasi* merupakan proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar, profesionalisasi pada dasarnya serangkaian proses pengembangan profesional.

Pendapat lain tentang profesionalisme. Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* yang memiliki arti pekerjaan (Jhon dalam Zahroh, 2014:115). Mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri menurut Arifin dalam Zahroh (2014:117) sebagai berikut: “suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus”. Menurut Zahroh (2014:117) mengenai profesionalisme sebagai berikut:

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Seseorang yang profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya yaitu mempunyai bukti kesanggupan memberi pengabdian yang bermutu tinggi dan dapat dipercayai melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sempurna. Sebagai contoh mengajar merupakan pekerjaan yang melibatkan intelek dan tindakan profesional, seorang guru yang terlatih pasti mempunyai pengetahuan yang

luas, mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran, serta mempunyai kepribadian yang mulia, serta bersikap dedikasi dalam pekerjaan mengajar (Sang, 2000: 25).

Menurut Ali (2001: 19) tentang profesi guru dianggap profesional dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :

1. Seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang khusus.
2. Terlibat dalam tugas secara sepenuh waktu.
3. Seorang guru terampil dalam tugas yang dilaksanakan (pedagogi).
4. Mendapat ganjaran (balasan) yang tinggi.
5. Tidak terikat dengan waktu (bukan bekerja mengikuti waktu pegawai).
6. Mendapat latihan yang khusus (Diploma Pendidikan).
7. Mempunyai ijazah.
8. Pakar rujuk masyarakat.
9. Pandangan yang tinggi di kalangan masyarakat.

Guru profesional dapat dilihat dari kerja yang dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan tindakan dan tingkah laku serta hasil kerja guru yang menunjukkan bakatnya dapat mencapai standard yang dikehendaki atau standard tujuan pendidikan. Sebagai contoh, seorang guru Sekolah Menengah Atas mempunyai bakat profesional dalam pembelajaran di kelas, dan seorang guru mempunyai bakat profesional dalam pengetahuan yang sangat luas untuk mentransfer ilmu. Adapun prinsip bakat Profesional menurut *Teacher Training Agency* (1994) dalam buku Blandford (2004:139) memberi definisi bakat profesional yang lebih hampir dengan bekerja yaitu:

Bakat atau kebolehan dapat dijelaskan dengan satu kerja yang boleh dilakukan oleh seseorang yang berada dalam bidang kerja itu. Ia adalah tindakan, tingkah laku serta hasil kerja individu yang menunjukkan kebolehannya yang mencapai standard yang dikehendaki

Bakat profesional guru ini mempunyai suatu nilai untuk membuat kerangka dalam menentukan pentingnya pembangunan guru yang profesional. Sebagai contoh, seorang guru memerlukan latihan untuk mengasah bakat dalam peranan di kelas. Dari contoh tersebut telah jelas bahwa profesionalisme guru sangatlah penting untuk meningkatkan pendidikan dimasa kini.

Pendidikan bagi anak usia remaja atau pendidikan Sekolah Menengah memerlukan seorang guru profesional yang mempunyai bakat dalam mengajar dan mempunyai potensi akademik. Selain itu, guru juga berpengalaman dalam mengajar di kelas sekolah menengah. Dengan ini para pendidik mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sekolah menengah. Dari pemaparan beberapa teori diatas, bahwa konsep profesionalisme guru sekolah menengah yaitu mempunyai keahlian dalam bidang yang khusus seperti keahlian dalam mengajar dan mendidik anak sekolah menengah serta meningkatkan kualitas profesi keguruan melalui pendidikan khusus atau pelatihan.

D. Pembinaan Profesionalisme Guru

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan cara pembinaan atau pelatihan guru. Pembinaan ini sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan Malaysia khususnya

dalam Pendidikan Agama Islam. Menurut Foster dan Seeker (2001: 1) dalam Matara (2016: 80) menyatakan bahwa : “Pembinaan (*Coaching*) adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak ”. Matara (2016: 80) mengartikan “Pembinaan merupakan suatu preskripsi untuk suatu perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang berencana di dalam satu organisasi”.

Jadi, pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu seseorang untuk meningkatkan kinerja serta membawa daripada perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang terstruktur dalam sebuah organisasi. Pernyataan beberapa teori tentang pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru mencapai kinerja dalam profesinya sehingga dapat mencapai sebuah perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan dalam dunia kependidikan.

Pemerintah telah mengadakan program-program pendidikan profesi guru yaitu program pendidikan profesi guru prajabatan (*pre-service training*) dan dalam jabatan (*in-service training*). Namun, dalam penelitian ini akan membahas tentang pembinaan profesi guru dalam jabatan (*in-service training*). Sebelum membahas pembinaan profesi guru dalam jabatan, peneliti akan sedikit membahas program profesi prajabatan.

Profesi prajabatan sebagaimana dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 membahas tentang program pendidikan profesi guru (PPG), PPG yang diselenggarakan pemerintah sangatlah penting bagi yang memiliki bakat dan minat menjadi

guru. Program ini mempersiapkan lulusan S1 dan S1/DIV Non kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga mendapatkan sertifikat pendidik profesional pada anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditugaskan pemerintah sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu, LPTK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Selanjutnya program pendidikan bagi profesi guru dalam jabatan yang pemerintah adakan bertujuan untuk dapat diakui sebagai pendidik profesional. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidikan yang diperoleh dengan cara sistematis yaitu melalui sertifikasi guru. Guru dalam jabatan yang telah mempunyai syarat dapat melaksanakan sertifikasi dengan cara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Buku 3 PLPG, 2017:1).

Program PPG mempunyai tujuan untuk menghasilkan guru yang profesional, selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 9 tahun 2010 tentang program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan pasal 2 yang membahas tujuan PPG sebagai berikut:

Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Pengembangan profesionalisme guru tidak akan berhenti apabila calon guru selesai mendapat pendidikan prajabatan. Melainkan banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sikap profesionalisme keguruan selama pengabdianya sebagai profesi guru. Yaitu melalui pelatihan profesi guru dalam jabatan (*in-service training*). Jadi, pelatihan profesi guru dalam jabatan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sikap profesionalisme guru dalam masa pengabdianya sebagai profesi guru (Saud, 2009: 104).

E. Pentingnya Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Jabatan

Profesionalisme guru dalam jabatan sangat penting. Karena seorang yang mempunyai profesi guru mempunyai tanggung jawab atas profesinya. Oleh karena itu seorang guru bertanggung jawab untuk meningkatkan kesan profesi guru dengan memberi pengabdian yang bermutu tinggi seperti mengajar peserta didik dengan baik sampai mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 9 tahun 2010 tentang program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa penting seorang guru menambahkan ilmu pengetahuan serta keahlian dalam bidang kependidikan supaya dapat menjalankan profesi sebagai guru dengan baik hingga mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan sempurna. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menepati tanggung jawab profesi

keguruan terhadap profesionalisme guru. Berikut ini pentingnya profesionalisme guru bagi guru dalam jabatan (Madjid, 2016: 81-129):

1. Meningkatkan kompetensi guru

Menurut Boyatzis dalam Madjid (2016: 81-90) kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang terlihat dari sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Kompetensi juga salah satu sebagai persyaratan seseorang khususnya pemimpin dan menejer dalam mengemban pesan, tugas, atau tanggung jawab masing-masing atas profesinya. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya. Karena kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku guru yang akan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik maupun masyarakat. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik, masyarakat, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal guru. Kompetensi keempat yang harus dimiliki guru yaitu

kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup dari penguasaan materi dan substansi keilmuan yang menaungi materi sampai penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme guru sangat penting bagi profesi keguruan untuk meningkatkan empat kompetensi guru sebagaimana dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

2. Menjaga komitmen guru

Menurut Madjid, (2016, 96) komitmen dalam profesi guru merupakan sikap guru yang menggambarkan kesetiaannya dalam bekerja sebagai profesi guru dan sekolah tempat guru bekerja. Komitmen dalam dunia profesi guru ada beberapa bentuk yaitu, komitmen afektif, komitmen kontinuens, dan komitmen normatif.

Komitmen afektif merupakan ikatan secara emosional yang melekat pada seorang guru untuk mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dalam organisasi serta penentu atas dedikasi dan loyalitas pada organisasi yang digeluti (Kartika dalam Madjid, 2016: 98-99). Komitmen kontinuens merupakan suatu keadaan di mana guru membuntuhkan untuk tetap tinggal, dimana mereka berfikir bahwa meninggalkan organisasi atau sekolah akan merugikan bagi mereka atau bagi sekolah, dengan ini individu dengan komitmen yang tinggi akan bertahan dalam organisasi atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu

komitmen normatif. Komitmen normatif merupakan suatu perasaan dari guru tentang kewajiban dalam profesi guru untuk bertahan di sekolah.

Penjelasan komitmen guru di atas, bahwa sebuah komitmen harus ditamanamkan dalam diri guru agar selalu loyal dan berdidikasi dalam melibatkan dirinya sebagai profesi guru di sekolah. Karena komitmen mempunyai kontribusi dan pengaruh positif terhadap kinerja guru sebagaimana dalam penelitian yang dilakukakn oleh Madjid di beberapa sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana analisis dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru (Madjid, 2016: 125-126) sebagai berikut:

Komitmen memiliki pengaruh sebesar 0,286 terhadap kinerja guru. Artinya komitmen memiliki hubungan yang positif dengan kinerja guru sebesar 28,6%. Dalam penelitian ini komitmen guru dilihat dari 3 dimensi, yaitu komitmen afektif (KAF), komitmen kontinuens (KKTS), dan komitmen normatif (KN). Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi komitmen memiliki nilai loading berturut-turut sebesar 0,905, 0,100 dan 0,371. Sedangkan kinerja guru mempunyai nilai loading 0,223, 0,032, 0,375, 0,285 dan 0,926.

3. Memotivasi guru

Motivasi merupakan salah satu pendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan ini motivasi dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja yang dapat menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara mendorong gairah kerja seseorang agar bekerja keras (Madjid, 2016: 112). Salah satu teori menurut Mc Clelland dalam Madjid (2016: 112) yaitu

teori motivasi prestasi, bahwa hal yang dapat memotivasi seseorang yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi serta kebutuhan akan kekuasaan.

Dari ketiga kebutuhan tersebut dapat memotivasi seorang guru agar bergairah dan semangat dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukakn oleh Madjid di beberapa sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut bahwa variabel motivasi berpengaruh positif, artinya semakin tinggi motivasi yang dimiliki guru maka kinerja guru akan semakin tinggi. Berikut ini hasil penelitian kontribusi motivasi terhadap kinerja guru (Madjid, 2016: 128-129):

Motivasi memiliki pengaruh sebesar 0,363 terhadap kinerja guru. Artinya baha motivasi memiliki hubungan yang positif dengan kinerja guru sebesar 36,3%. Dalam penelitian ini, motivasi dilihat dari 3 dimensi, yaitu kebutuhan akan prestasi (KAP), kebutuhan akan afiliasi (KA) dan kebutuhan akan kekuasaan (KKS). Hasil penelitian menggambarkan bahwa dimensi motivasi memiliki nilai loading berturut-turut sebesar 0,837, 0,851 dan 0,667. Sedangkan untuk dimensi kinerja guru memiliki nilai loading 0,846, 0,709, 0,581, 0,527 dan -0,154.

Pendapat lain mengenai pentingnya profesionalisme dalam buku 3 PLPG (2017: 1) yaitu kenaikan pangkat. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, kedudukan guru pada pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 12 menjelaskan bahwa setiap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk

diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan ini, guru yang telah mempunyai syarat dapat melaksanakan sertifikasi dengan cara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau Pendidikan Profesi Guru (Buku 3 PLPG, 2017: 1).

Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu kepentingan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu ciri guru yang profesional merupakan guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Ketika mengajar dalam proses pembelajaran di kelas seorang guru harus memiliki keterampilan, yaitu berupa keterampilan membuka dan menutup pengajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan media pembelajaran, membimbing diskusi kelompok, mengelola kelas, mengadakan variasi, serta keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil (Saud, 2009: 55-56).

Menurut Priansa (2014: 77-194) terdapat empat pentingnya meningkatkan profesionalisme guru yaitu: *Pertama*, Meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya yang nyata yang dicapai guru di sekolah. *Kedua*, Keterampilan manajerial guru. Menurut Katz dalam Priansa (2014: 150) terdapat tiga dasar keterampilan manajerial guru yaitu keterampilan konseptual, keterampilan kemanusiaan serta keterampilan teknis. Dengan ketiga keterampilan tersebut, merupakan bagian dari pentingnya profesionalisme guru untuk meningkatkan keterampilan manajerial. *Ketiga*, Kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru

merupakan kemampuan dan kompetensi guru, baik *hard skill* maupun *soft skills* untuk mempengaruhi atau memberikan inspirasi dan teladan yang baik bagi seluruh warga yang ada di sekolah terutama peserta didik. *Keempat*, Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan proses dua orang atau lebih yaitu antara guru dan peserta didik melakukan pertukaran informasi sehingga menghasilkan pemahaman yang sama.

Jadi, beberapa pendapat di atas terdapat sembilan pentingnya profesionalisme guru yaitu; meningkatkan kompetensi guru, menjaga komitmen guru, memotivasi guru, kenaikan pangkat, keterampilan dalam proses belajar dan mengajar, meningkatkan kinerja guru, keterampilan manajerial guru, kepemimpinan guru, serta keterampilan komunikasi. Dengan ini pembinaan dan pengembangan profesi guru sangat penting. Yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru, menjaga komitmen guru, motivasi kerja guru, serta penting untuk kenaikan pangkat profesi keguruan. Sebagaimana hal ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, lingkungan kerja, masyarakat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan bagi guru itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengadakan pembinaan/pelatihan bagi guru dalam jabatan.

Menyadari betapa penting seorang profesionalisme guru. Adapun beberapa tanggung jawab mengenai profesi keguruan, menurut Sang (2000: 26-28) dalam bukunya terdapat beberapa tanggung jawab profesi keguruan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap pelajar

Seorang guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam perannya di dalam kelas, sekolah maupaun di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan ini seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan mengajar peserta didik agar bertambah kemampuan dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor; bersikap adil terhadap setiap peserta didik tanpa membandingkan dengan faktor jasmani, mental, emosi, politik ekonomi, sosial, keturunan maupun agama; menunjukkan suatu cara berpakaian yang rapi untuk memberikan contoh yang baik dalain sebagainya.

2. Tanggung jawab terhadap ibu-bapak

Seorang guru harus mempunyai tanggung jawab utama pada ibu bapak terhadap anak-anak mereka. Karena orang tua telah percaya terhadap guru untuk mendidik anaknya dalam bangku sekolah serta seorang guru mengelakkan diri daripada pengaruh kedudukan sosial dan ekonomi orang tua peserta didik dan menjaga tutur kata yang baik terhadap mereka mengenai anak-anak mereka, agar rasa kepercayaan tetap terjaga dengan baik.

3. Tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara

Seorang guru sepatutnya menjauhkan diri daripada ajaran yang dapat merusak peserta didik. Sepatutnya seorang guru mengajarkan hal baik terhadap peserta didik dalam membina hubungan dengan masyarakat dan negara. Seperti memberikan nilai-nilai yang positif

dalam diri peserta didik seperti menghormati orang tua, menghormati perbedaan kebudayaan, keturunan dan agama. Hal ini sangatlah penting untuk membangun pendidikan karakter teradap peserta didik.

4. Tanggung jawab terhadap teman dalam profesi keguruan

Tanggung jawab terhadap rekan dalam profesi keguruan merupakan hal yang penting. Karena dalam hal ini seorang guru menjauhkan diri dari mencemarkan nama baik seorang teman dalam profesi keguruan di hadapan peserta didik atau orang tua peserta didik. Karena hal itu dapat menjatuhkan atau mencemarkan nama baik profesi keguruan. Seorang guru berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggung jawab dengan baik dan bersungguh-sungguh serta bersedia membantu teman dalam profesi keguruan.

Pendapat lain mengenai tanggung jawab guru (Hawi, 2013: 12-13), sebagai berikut, “guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik”. Dengan demikian, tanggung jawab seorang guru merupakan untuk membentuk peserta didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama Islam, nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Menurut Saud (2009: 32), terdapat enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya yaitu, Guru bertugas sebagai pengajar, pembimbing, administrator kelas, pengembangan kurikulum, mengembangkan profesi, serta membina hubungan dengan masyarakat.

Jadi, dari beberapa pendapat tersebut tanggung jawab seorang guru sangatlah luas. Tanggung jawab seorang guru tidak saja memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas saja melainkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Antara tugas dan tanggung jawab guru menurut pendapat di atas sebagai berikut: tanggung jawab terhadap peserta didik, terhadap ibu dan bapak, terhadap masyarakat dan negara, tanggung jawab terhadap teman dalam profesi keguruan, bertugas sebagai pengajar, pembimbing, administrator kelas, pengembangan kurikulum, mengembangkan profesi, serta membina hubungan dengan masyarakat.

F. Bentuk Pembinaan Profesionalisme Guru

1. Bentuk Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah di Indonesia

Sebagai pendidik atau guru agama Islam di sekolah menengah, dituntut agar mempunyai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru agar menjadi guru yang profesional. Dengan ini pemerintah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yaitu, pendidik pada sekolah menengah atau yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana; (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; (c) sertifikasi guru untuk SMA/MA (Kunandar, 2007: 72-73).

Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru dapat

diperoleh melalui pendidikan profesi, adapun kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi, sertifikasi guru dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (Kunandar, 2007: 75-79).

Mengembangkan profesi keguruan dapat dilihat dari dimensi sifat dan substansinya terdapat empat ranah (*Taxonomy*) untuk menjadikan guru yang benar-benar profesional. dari empat ranah tersebut yaitu penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, induksi pemula berbasis sekolah, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi dan profesionalisasi berbasis individu (Danim, 2011: 2-3).



Gambar 0.1 Empat Ranah Pengembangan Guru

Dari empat ranah tersebut yang membahas pembinaan/ pelatihan guru profesional dalam jabatan yaitu profesionalisasi berbasis institusi dan profesionalisasi berbasis individu. Profesionalisasi berbasis institusi

yaitu pembinaan dan pengembangan guru yang dilakukan melalui perkara institusi seperti pendidikan, pelatihan, *workshop*, magang dan studi banding. Sedangkan profesionalisasi berbasis individu yaitu melakukan profesionalisme keguruan secara mandiri disebut juga sebagai Guru Profesional Madani (GPM) (Danim, 2011: 6-8). Berikut ini bentuk pembinaan guru dalam jabatan:

a. Pembinaan berbasis institusi

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru berupa pembinaan kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Adapun fokus kegiatan pembinaan pengembangan profesional guru untuk mengembangkan empat kompetensi dasar tersebut. Kegiatan ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu metode praktis (*on the job training and development*) dan teknik presentasi atau metode simulasi.

Metode praktis terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pelatihan instruksi pekerjaan, magang, *internship*, *assistantship* atau penugasan sementara, rotasi jabatan, perencanaan karier pribadi, pelatihan eksekutif, asisten kepenyeliaan (pengarahan, konseling, dan *monitoring*). Teknik presentasi dan metode simulasi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu metode kursus formal, pelatihan oleh diri sendiri (pengajaran berprogram, membaca, dan kursus korespondensi), pelatihan oleh pihak lain (ceramah dan kursus kelas),

simulasi (vestibule = pelatihan oleh pelatih khusus, *management games*, pusat *assesment*), bermain peran, presentasi video, pelatihan laboratoris, dan metode konferensi (Danim, 2011: 85).

Kegiatan pengembangan profesi guru ini terkait langsung dengan tugas utamanya sebagai seorang pendidik. Selain itu, kegiatan pengembangan dan pembinaan yang berfokus pada keprofesian terkait langsung dengan kebutuhan guru sebagai tenaga fungsional, termasuk untuk kepentingan kenaikan pangkatnya. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tabel 1 berikut ini memuat ranah pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru dan Permenpan dan Reformasi Birokasi No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Danim, 2011: 88-91).

Tabel 0.1 Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Guru

No.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian	Wadah Kegiatan	Persyaratan/Sifat
1	Ativitas kolektif guru yang meningkatkan kompetensi/keprofesian	a. KKG b. MGMP c. Wadah lain	a. Berfokus pada kompetensi atau menjunjung
2	Pendidikan atau pelatihan	a. LPMP b. P4TK c. LPTK/PT d. Dinas pendidikan e. <i>Training provider lain</i>	a. Berfokus pada kompetensi atau menjunjung b. Bersifat melembaga c. Terakreditasi/diakui d. Bukti fisik

3	Pemagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan b. Dunia industri c. Lembaga pelatihan d. Lembaga internasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung b. Melebaga c. Terakreditasi/ diakui d. Bukti fisik
4	Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurnal b. Majalah c. Media masa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung b. Terakreditasi atau legal c. Melebaga d. Bukti fisik
5	Karya inovatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Individual b. Laboratorium c. Dunia kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti fisik b. Deskripsi proses lahirnya dan makna karya c. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung
6	Presentasi pada forum ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> a. Seminar akademik dan sejenisnya b. Seminar hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung b. Terakreditasi atau legal c. Melebaga d. Bukti fisik
7	Publikasi buku teks dan pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbit internasional b. Penerbit nasional c. Penerbit milik pemerintah d. Penerbit lokal/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung b. Ber-ISBN c. Publikasi Nasional d. Melebaga e. Bukti fisik
8	Publikasi buku pengayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbit nasional b. Penerbit lokal/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada kompetensi atau menjun-jung b. Ber-ISBN c. Publikasi Nasional d. Melebaga e. Bukti fisik

9	Publikasi buku pedoman guru	a. Penerbit nasional b. Penerbit lokal/lembaga	a. Berfokus pada kompetensi atau menjunjung b. Ber-ISBN c. Publikasi Nasional d. Melembaga e. Bukti fisik
10	Publikasi pengembangan lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan-an layanan	a. Penerbit nasional b. Penerbit lokal/lembaga	a. Berfokus pada kompetensi atau menjunjung b. Ber-ISBN c. Publikasi Nasional d. Melembaga e. Bukti fisik
11	Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah	a. Lembaga pemerintahan b. Penyelenggara pendidikan c. Organisasi kemasyarakatan d. Organisasi profesi	a. Bentuk fisik penghargaan b. Tingkat penghargaan

Berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan kegiatan pembinaan dan pelatihan guru, wadah kegiatan serta persyaratan/sifat pelaksanaan kegiatan tersebut. Wadah kegiatan tersebut sangat membantu guru dalam jabatan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Dari tabel di atas ada beberapa wadah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah seperti KKG, MGMP, LPMP, P4TK, LPTK/PT, dan lain sebagainya.

KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan forum komunikasi kerja guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Sebagaimana forum ini memiliki tugas dan fungsi untuk membahas masalah-masalah

yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru dapat berkreasi di dalamnya. Selain itu forum ini juga harus mampu membantu kelancaran pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan pendidikan pada umumnya (Mulyasa, 2013:144).

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan wadah kegiatan guru mata pelajaran sejenis, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya mereka bersama-sama memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Adapun pemecahan yang dilakukan secara musyawarah dan menganut paham demokratis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengelolaan pendidikan lainnya dapat dipecahkan sendiri oleh guru melalui *sharing* atau saling bertukar pengalaman, diskusi kelompok dan simulasi. Setelah pelaksanaan musyawarah, pelaksanaan (Mulyasa, 2013: 153).

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) merupakan unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional dibidang penjaminan mutu pendidikan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Nasional. Adapun tugas LPMP yaitu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah pada jalur pendidikan formal di provinsi berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas No. 66/2008).

P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Unit ini memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan tenaga guru. Dengan ini, tujuan P4TK yaitu menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional dari waktu ke waktu (<https://id.wikipedia.org>).

LPTK/PT (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/ Perguruan Tinggi) merupakan perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan PPG (Program Profesi Guru) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendiknas No.9/2010).

Pendapat lain mengenai program pengembangan profesionalisme guru yaitu; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) dalam Saad (2009, 105-110), sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru

Bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, hal ini sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Maka masih ada beberapa guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, program ini untuk guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru berupa program berkelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar.

2) Program penyetaraan dan sertifikasi

Program ini bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Hal ini terjadi karena keterbatasan sekolah mengenai tenaga kependidikan. Sering terjadi di dunia pendidikan seorang guru memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai dengan pendidikan keguruan. Misalnya seorang guru mempunyai ijazah S1 tetapi bukan kependidikan. Mereka dapat mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi.

3) Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi

Guru yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup. Guru masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Program pelatihan yang diadakan yaitu pelatihan yang sesuai dan dibutuhkan oleh guru, yakni mengacu pada kompetensi guru. Pelatihan yang diadakan yaitu Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK).

PTBK merupakan pelatihan mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga materi pelatihan yang diberikan oleh guru berupa gabungan bidang-bidang ilmu yang secara utuh diperlukan untuk mencapai kompetensi (Depdiknas 2004 dalam Saud, 2009:106).

4) Program supervisi pendidikan

Ketika implementasi proses pembelajaran di kelas, masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses pembelajaran. Banyak persepsi kurang tepat mengenai tugas supervisor, di mana tugas supervisor dimaknai tugas untuk mencari kesalahan atau mengadili guru. Padahal tujuan supervisi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dalam perubahan ke arah yang lebih baik.

5) Program pemberdayaan MGMP

MGMP merupakan suatu forum atau wadah untuk kegiatan profesional guru mata pelajar sejenis. Yang diselenggarakan di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yaitu guru SMP dan SMA Negeri atau Swasta yang bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dengan MGMP guru mata pelajaran diharapkan akan meningkatkan

profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran bermutu yang sesuai dibutuhkan oleh peserta didik.

6) Simposium guru

Simposium guru merupakan wadah kegiatan yang diadakan untuk saling *sharing*/berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah dalam proses pembelajaran di kelas selain kegiatan MGMP. Selain media untuk *sharing*, simposium guru berfungsi untuk kompetisi antar guru. Yaitu dengan kegiatan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya penggunaan metode pembelajaran di kelas, hasil penelitian tindakan kelas, atau karya ilmiah.

7) Melakukan penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak, dengan ahli pendidikan dalam rangka meningkatkan praktik pembelajaran secara terus menerus. PTK merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru.

8) Magang

Kegiatan magang dilakukan bagi guru pemula yaitu bentuk pelatihan *pre-service* atau *in-service* bagi guru junior secara gradual menjadi guru profesional. Proses kegiatan magang dilakukan di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu.

Pada dasarnya semua guru mempunyai hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi keguruan. Namun, kebutuhan setiap guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi mempunyai beragam sifatnya. Kebutuhan tersebut yaitu pemahaman tentang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini (Danim, 2011: 91). Pada dasarnya kegiatan pembinaan profesionalisme guru semua sama. Hanya saja, terdapat pembinaan/pelatihan yang mengkhususkan guru mata pelajaran berdiskusi di satu kelompok yaitu diprogram kegiatan MGMP dan simposium guru. Dengan demikian guru agama Islam dapat memperoleh pelatihan secara khusus untuk meningkatkan profesionalisme dengan adanya wadah kegiatan ini.

b. Pembinaan berbasis individu

Guru Profesional Madani (GPM) menjalani pengembangan profesional secara terus menerus tanpa kelembagaan. GPM memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif. Dengan ini dapat dilihat bahwa guru sebagai seorang pendidik di sekolah harus profesional dan perlu kesadaran diri untuk melakukan pengembangan diri secara mendalam atas profesi guru. Seorang GPM memiliki secara penuh tiga pilar yang menjadi

identitas dirinya sebagai tenaga profesional yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan.

Pengetahuan merupakan segala fenomena yang diketahui sehingga memiliki daya prediksi, kontrol, dan aplikasi tertentu. Pada pengertian yang lebih tinggi pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki oleh GPM. Keahlian merupakan penguasaan substansi keilmuan, dengan ini dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Selain itu keahlian juga bermakna kepakaran dalam bidang ilmu lain disertai keterampilan mentransformasikannya kepada peserta didik. Persiapan akademik memiliki makna bahwa untuk mencapai derajat profesional, atau untuk memasuki profesi khusus diperlukan persyaratan pendidikan khusus seperti lembaga pendidikan formal yaitu jenjang perguruan tinggi (Danim, 2011: 99-103).

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- 7) Memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Seorang GPM memiliki berbagai usaha untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang guru yang profesional. Berikut ini beberapa sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang GPM untuk membina dan mengembangkan dirinya sebagai seorang guru yang profesional (Danim, 2011: 117-258):

- 1) Memotivasi diri sendiri.

Seorang GPM memiliki motivasi diri yang kuat. Tanpa adanya rangsangan dari eksternal dia tetap tampil prima sebagai profesi guru. Maka, segala sesuatu akan lebih produktif apabila guru mempunyai motivasi internal yang tinggi. Motivasi diri

merupakan panggilan jiwa pada diri sendiri dengan ikhlas, kesiapan mental yang tulus serta rangsangan internal yang muncul dalam diri GPM untuk membantu tugas pokok sebagai guru. Sehingga apabila GPM menerima kegagalan. Dia akan berusaha untuk memotifasi diri dan berusaha untuk tidak menyerah akan keagalannya, dia akan berlatih terus dan mencoba lagi.

2) Mendisiplinkan diri sendiri

Seorang GPM memiliki kemampuan mendisiplinkan diri. Disiplin diri adalah kemampuan memosisikan diri untuk mengambil tindakan tanpa menghiraukan suasana emosional, komponen energi diri untuk mewujudkan kehendak serta mempunyai kontrol dan konsistensi diri. Jadi, apabila seorang GPM memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan diri maka seorang GPM akan memosisikan diri dalam profesi keguruan dalam mengambil tindakan tanpa menghiraukan suasana emosional, sehingga dapat memosisikan dirinya untuk mengambil tindakan tertentu sesuai dengan substansi, prosedur, limit waktu, dan kriteria hasil yang ingin dicapai.

3) Mengevaluasi diri sendiri.

GPM akan terus menerus melakukan perenungan untuk menilai diri sendiri, baik dari kemajuan maupun kemundurannya. Evaluasi bagi GPM merupakan penilaian yang

dilakukan terhadap proses dan hasil kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan cara pengukuran atas capaian kinerja guru yang dilakukan melalui observasi, wawancara, penilaian sejawat dan lain sebagainya. Dengan ini, secara umum evaluasi kinerja guru merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan profesional guru itu sendiri.

4) Memiliki kesadaran diri

Seorang GPM memiliki rasa kesadaran diri tingkat tinggi. Dan kesadaran diri merupakan salah satu dasar GPM sebagai tenaga profesional. Definisi dari kesadaran diri merupakan pemahaman nyata atas keberadaan diri sendiri. Selain itu definisi dari kesadaran diri menyebutkan bahwa ada tiga hal yang harus dikenali dan disadari oleh diri sendiri. *Pertama*, nilai dan tujuan yang dimiliki. *Kedua*, kebiasaan, gaya, kekuatan dan kelemahan diri. *Ketiga*, hubungan antara perasaan, pemikiran, dan tingkah laku.

5) Mengembangkan diri sendiri.

GPM merupakan pengembangan diri yang cerdas dan berkelanjutan terus menerus. GPM akan menyadari bahwa sebuah profesi tanpa dengan profesional akan ditelan oleh sejarah peradaban pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Oleh karena itu seorang GPM akan berusaha untuk mengembangkan dirinya dari segi mutu diri, inovasi dari segi pengetahuan dan pembelajaran, menjalin hubungan dan lain sebagainya.

6) Menjadi pembelajar sejati

Sebagai seorang GPM harus menjadi pembelajar sejati. Karena dengan GPM menjadi pembelajar akan tumbuh sebagai tenaga yang profesional. Bahwa pertumbuhan dan pengembangan yang dilakukan oleh GPM merupakan suatu hal yang berkelanjutan dan terus menerus. Dengan ini ketika guru menjadi pembelajar yang sejati, siswa akan mudah didorong menjadi pembelajar juga. Asumsinya, segala upaya guru untuk mengubah perilaku siswa akan lebih mudah dengan memberi contoh daripada menyuruh.

7) Berkomunikasi secara efektif

GPM merupakan komunikator pembelajaran yang sangat efektif. Karena dia menyadari bahwa inti proses ketika pembelajaran adalah komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik. Dengan ini GPM dan peserta didik dapat memainkan peran sebagai komunikator sekaligus pendengar yang baik.

8) Berempati dengan semua orang

Sebagai GPM memiliki kemampuan berempati yang tinggi, khususnya kepada peserta didik dan komunitas di sekolah. GPM menyadari atas kehidupannya dalam sistem sosial, baik di sekolah maupun luar sekolah. Dimana sekolah merupakan tempat guru melakukan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran serta berkumpulnya orang dengan multistatus, seperti guru, kepala sekolah, staf tata usaha, teknisi, peserta didik dan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah.

Pendapat lain mengenai pembinaan berbasis individu menurut Priansa (2014: 118) yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan undang-undang pendidikan nasional atau kebijakan pendidikan. Kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan dengan berbagai jenis kegiatan yaitu melalui diklat fungsional, kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi. Diklat fungsional merupakan kegiatan pelatihan guru yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif merupakan kegiatan pengembangan diri profesi keguruan melalui kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Daryanto (2013: 134-136) pengembangan profesi guru dengan model pertimbangan kualitas diri sangat penting. Karena dengan model kualitas diri guru akan termotivasi untuk selalu meningkatkan “*personal mastery*” dan “*mental model* yang berada dalam dirinya. Meningkatkan diri dengan “*personal mastery*” yang tinggi, guru akan menjadi lebih bijak. Karena di dalam diri guru akan tumbuh rasa percaya diri “*self confidence*”, rasa tanggung jawab atas profesinya serta meningkatnya komitmen dalam dirinya. Sedangkan dengan “*mental model*” guru diharapkan mempunyai cara pandang secara obyektif serta guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap dan perilaku.

Penjelasan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan berbasis individu tidak kalah penting untuk meningkatkan profesionalisme guru agama Islam sekolah menengah. Karena dengan kegiatan pengembangan berbasis individu, seorang guru dapat meningkatkan profesionalisasi dengan mandiri atas motivasi diri. Dengan ini dapat mendorong guru dalam meningkatkan kinerja dalam profesinya.

2. Bentuk Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah di Malaysia

Di Malaysia ada istilah khusus bagi guru agama Islam yang menyangkut tingkat profesional, yaitu Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI). GCPI sekolah menengah merupakan guru yang

mempunyai ciri-ciri guru efektif, berkesan, berkualitas dan guru yang memiliki kepakaran khusus dalam pendidikan Islam sekolah menengah atau sederajat. Selain itu guru cemerlang merupakan nama umum yang digunakan untuk guru yang memiliki tahap Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) mencapai tahap penguasaan ilmu Islam mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik serta senantiasa memotivasi diri dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru agama Islam sekolah menengah (Jasmi, 2010: 23-25).

Peningkatan profesionalisme guru di Malaysia terdapat dua bentuk pembinaan dan pengembangan yaitu pembinaan berbasis institusi/kelembagaan dan pembinaan berbasis individu. Di Malaysia pembinaan berbasis individu disebut juga dengan konsep sendiri atau Pendidikan ke Arah Perkembangan Diri. Berikut ini bentuk pembinaan profesionalisme guru di Malaysia:

a. Pembinaan berbasis institusi/kelembagaan.

Pembinaan atau pelatihan berbasis institusi yaitu pelatihan yang dilakukan guru dalam jabatan yang disebut juga dengan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) atau Kursus dalam Perkhidmatan (KDP). LDP dan KDP dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. LDP dijalankan dalam bentuk kursus, seminar, *konvensyen*, *simposium* dan bengkel. Pembinaan ini melibatkan guru-guru dalam jabatan untuk mengikuti LDP yang

biasanya dijalankan di institusi perguruan tinggi. Berikut ini lembaga penyelenggara LDP (Rahim, 2001: 21-23):

- 1) Bahagian Pendidikan Guru (BPG).
- 2) Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).
- 3) Jabatan Pendidikan Negeri (JPN).
- 4) Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).
- 5) Institusi Aminuddin Baki, Seri Layang (IAB).
- 6) Biro Tata Negara (BTN).
- 7) Institut Tadbiran Awam (INTAN).
- 8) Agensi luar.

Pendapat lain mengenai bentuk program pengembangan guru yaitu menurut Bolam dalam Blandford (2004: 12), sebagai berikut;

- 1) Pengembangan praktisi pendidikan

Pengembangan praktisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai dasar pengembangan diri, sekolah, layanan konsultasi, observasi, gambaran awal bertugas, serta teknik pengajaran kelompok.

- 2) Pendidikan profesional

Pendidikan profesional yaitu berupa pengadaan di institusi perguruan tinggi dengan memusatkan perhatian pada hubungan antara teori pendidikan dan implementasinya. Kursus pendidikan ini harus mengarah pada kualifikasi profesional yang diakui di tingkat tertinggi.

3) Latihan profesional

Latihan profesional berupa konferensi, kursus, dan lokakarya untuk guru, latihan ini menekankan pada realitas tugas guru di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan. Latihan ini dikendalikan oleh pakar penasehat ataupun pelatih dari institusi pendidikan tinggi.

4) Layanan dukungan profesional

Layanan dukungan profesional membantu karir guru. Bahwa tugas manajemen dan staf pendukungnya untuk memenuhi syarat dalam kontrak layanan mereka, antara; prosedur pemilihan, rekrutmen guru, kenaikan pangkat, pengembangan karir, penilaian, layanan konsultasi, pembentukan kelompok, pembagian tugas baru, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua guru.

Cara pelaksanaan semua kegiatan program peningkatan profesionalisme keguruan di atas bergantung pada pengetahuan, kemampuan dan keupayaan individu, kelompok bertindak, pihak pengurus serta penasehat. Pelatihan ini berguna bagi guru untuk meningkatkan karirnya di sekolah. Kualitas semua aktivitas program pengembangan profesionalisme guru bergantung pada sejauh mana sekolah itu telah menjadi sebuah komunitas dengan budaya pembangunan yang positif (Blandford, 2004:13). Dengan ini disimpulkan bahwa kesuksesan karir guru bergantung pada setiap

individu guru, selain itu sekolah juga berpengaruh untuk meningkatkan profesionalisme guru.

b. Pendidikan ke arah pengembangan diri (konsep sendiri).

Menurut H. V. Perkins dalam Sang (1996:218), konsep diri (konsep sendiri) terdiri daripada persepsi, kepercayaan, sikap serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. Oleh karena itu konsep diri ini dapat mempengaruhi segala tingkah laku pada seorang individu. Pembentukan konsep pada diri berdasarkan kepada persepsi-persepsi diri dan orang lain. Maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri (Sang, 1996: 218);

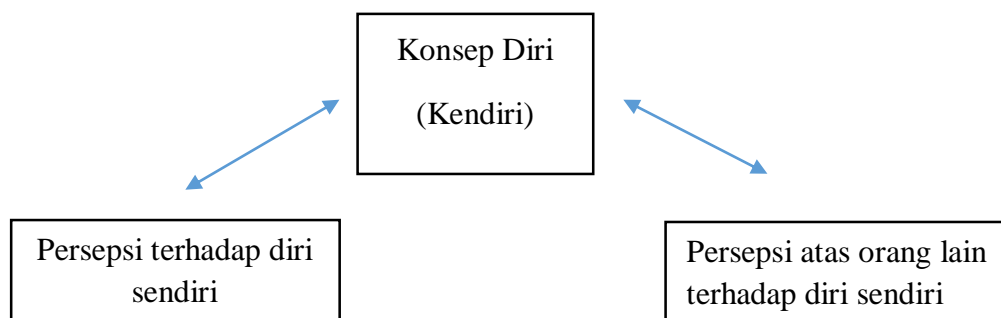
- 1) Pengaruh *baka* (genetik) ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan.
- 2) Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah/akhlak.
- 3) Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku.
- 4) Emosi mempengaruhi perasaan.
- 5) Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan.
- 6) Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain
- 7) Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku agar sesuai dengan persepsi orang lain terhadapnya.
- 8) Status sosial seseorang mempengaruhi pembentukan sahsiah/akhlak seseorang.

Konsep diri banyak mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah penyesuaian diri yaitu berupa; *pertama*, penerimaan atau penolakan diri dan *kedua*, penghargaan diri/percaya pada diri sendiri. Seseorang yang dapat menyesuaikan diri ke arah penerimaan sendiri biasanya menggunakan cara saling berbagi kasih sayang dengan keluarga, berbagi dengan teman atau guru di sekolah. Perasaan yang dirasa adalah bahwa dia telah diterima dan dihargai oleh orang yang telah berinteraksi dengannya. Perasaan ini akan membawa dirinya untuk menerima dan menghargai dirinya. Begitu sebaliknya, jika seorang individu merasa kurang mendapat penerimaan dari orang yang berinteraksi dengannya, maka dia akan mengalami perasaan penolakan diri. Perasaan ini akan membawakan sisi negatif pada dirinya dalam usaha mengatasi masalah hidup yang dihadapinya.

Selanjutnya, penghargaan sendiri/apresiasi pada diri sendiri didapat daripada penilaian terhadap kebaikan dalam diri sendiri. Apresiasi sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu apresiasi sendiri tinggi, sederhana dan rendah. Orang yang mempunyai apresiasi sendiri yang tinggi, mereka mempunyai sikap positif dan yakin terhadap diri sampai mencapai apa yang diharapkan, yakin pada diri sendiri bahwa dia berbakat dan bisa dalam menghadapi masalah.

Orang yang mempunyai apresiasi sendiri sederhana, biasanya orang tersebut kurang memiliki rasa kemampuan pada diri, senantiasa merasa terdapat konflik pada hidupnya dan ragu-ragu dalam

mengambil keputusan. Sedangkan bagi orang yang mempunyai apresiasi sendiri rendah biasanya mereka bersikap negatif, kurang yakin pada diri sendiri dan ragu akan kemampuan diri dan sering berusaha untuk melepaskan diri dari masalah (Sang, 1996: 218-219). Secara ringkas, konsep sendiri merupakan seluruh perkembangan akhlak seseorang individu yang unik dan dinamik. Yang mana, konsep diri berarti persepsi seorang individu termasuk persepsi orang lain terhadap dirinya (Sang, 1996: 219).



Gambar 0.2 Pembentukan Konsep Diri

Berdasarkan di atas, perkembangan sendiri dapat disimpulkan sebagai perkembangan potensi diri dari segi intelek, rohani, sosial, dan jasmani. Usaha untuk mengembangkan diri tidak hanya bergantung pada sifat positif dari individu, tetapi juga keahlian seperti keahlian belajar, berfikir, sosial, komunikasi serta keahlian dalam menangani masalah (Sang, 1996: 220).

G. Strategi Pembinaan Profesionalisme Guru

Menurut Sanjaya (2011: 125) istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Di dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai “*a plan, method or series of activities designed to achieves a particular educational goal*” (David dalam Sanjaya, 2011: 126). Jadi, dengan demikian strategi pembinaan dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembinaan.

1. Strategi Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Jabatan Sekolah

Menengah di Indonesia

Menurut Danim (2011: 94) dilihat dari sisi prakarsa lembaga, pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru dilaksanakan dengan berbagai strategi diantaranya yaitu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat, sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan

- 1) *In-house training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT merupakan pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan. Dengan startegi pembinaan dan pengembangan melalui pelatihan IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier keguruan tidak harus dilakukan secara

eksternal. melainkan dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain.

- 2) Program magang. Program magang merupakan pelatihan yang dilakukan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program ini dapat dilakukan dalam periode tertentu, misalnya seorang guru magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah. Program ini dipilih sebagai alternatif pembinaan dan pengembangan guru untuk keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata.
- 3) Kemitraan sekolah. Pelatihan ini dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan sekolah yang kurang baik, antara sekolah negeri dan swasta. Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan keunikan yang dimiliki sekolah, misalnya di bidang manajemen sekolah atau kelas.
- 4) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta dalam satu tempat tertentu, melainkan pelatihan menggunakan internet dan sejenisnya. Pelatihan ini tidak dilakukan dengan semua guru melainkan penuh dengan pertimbangan, bahwa tidak semua guru seperti di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau provinsi.

- 5) Pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan berjenjang dan khusus ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana cara penyusunan program dengan berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi.
- 6) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus ini dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.
- 7) Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan untuk membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan rekan sejawat.
- 8) Pendidikan lanjut. Pembinaan ini merupakan cara alternatif untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan bagi guru dalam pendidikan lanjut dapat dilaksanakan memberi tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi.

b. Non-pendidikan dan pelatihan

- 1) Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan dengan cara berkala menggunakan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami sekolah. Dengan ini para guru diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan kariernya sebagai guru.
- 2) Seminar. Pengikutsertaan guru dalam seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kegiatan ini memberi peluang bagi guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesi berkaitan dengan hal-hal yang lebih aktual dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) *Workshop*. Kegiatan *workshop* dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karier guru.
- 4) Penelitian. Kegiatan penelitian ini dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis penelitian lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Penulisan buku/bahan ajar. Buku bahan ajar yang ditulis guru dapat dalam bentuk diktat, buku pelajaran, atau buku dalam bidang pembelajaran.

- 5) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran dan lain sebagainya.
- 6) Pembuatan karya teknologi/karya seni. Pembuatan karya teknologi/seni yang dibuat oleh guru dapat berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Pendapat lain mengenai strategi pembinaan profesionalisme guru yaitu dengan melaksanakan pendidikan berupa: perkembangan IPTEK, persaingan global bagi lulusan, otonomi daerah (Saud, 2009: 98). Perkembangan IPTEK yang cepat, mengharuskan guru untuk menguasai hal-hal baru yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet, program multimedia sebagai alat pembelajaran. Persaingan global bagi lulusan, diberlakukannya pasar bebas melalui NAFTA tahun 1994. Setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang di Asia. Kondisi seperti ini memaksa guru agar segera memiliki kualifikasi pendidikan serta meningkatkan hasil lulusan yang berkompeten. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, memberikan perubahan yang mendasar terhadap sektor pemerintahan serta berpengaruh pada pendidikan. Pengelolaan pendidikan akan disentralisasikan semakin mendekati pendidikan kepada *stakeholders*

pendidikan di daerah. Maka, guru akan semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimiliki guru (Saud, 2009: 98-99).

Dalam pedoman pelatihan Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam (2014: 3), terdapat pembinaan khusus untuk meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yaitu dengan meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan strategi pengembangan kurikulum 2013. Untuk mempercepat kegiatan meningkatkan kompetensi GPAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam akan mengadakan pelatihan implementasi kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bagi guru PAI.

Menurut buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dalam Priansa (2014: 353), Penilaian Kinerja Guru (PKG) juga salah satu strategi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Seorang guru perlu melakukan pengembangan diri secara terus menerus dan proposional menurut jabatan fungsional guru. Oleh karena itu, agar fungsi dan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan kegiatan PKG. Dengan instrumen penilaian kinerja, mampu menggambarkan secara utuh tentang bagaimana kinerja sebagai guru, apa yang telah dilakukan oleh guru saat ini, dan masa depan apa yang hendak diwujudkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Penyusunan portofolio dalam jabatan. Penyusunan portofolio dalam jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan. Portofolio adalah (Daryanto, 2013: 140), “bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu”. Fungsi penyusunan portofolio dalam sertifikasi guru yaitu untuk menilai kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik.

Pengembangan Keprofesionalitas Berkelanjutan (PKB). Profesionalisme guru perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, serta berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalitas guru. Dengan PKB, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas secara profesional. PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi, yang dirancang untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan (Priansa, 2014: 117).

Beberapa strategi pembinaan dan pengembangan bagi guru yang dibahas di atas menunjukkan pengembangan profesi guru banyak berasal dari prakarsa kelembagaan. Adapun jenis pembinaan dan pengembangan berjenjang dan khusus, sehingga setiap guru dapat dikelompokkan sesuai dengan jenjang mereka mengajar. Bagi guru agama Islam sekolah

menengah akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan jenjang begitu yang lain. Sehingga akan mendapatkan hasil sesuai kemampuan yang diampu oleh guru.

2. Strategi Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah di Malaysia

Tugas, tanggung jawab dan peranan guru agama Islam sekolah menengah di Malaysia tidak jauh berbeda dari masa yang lalu, tetapi lebih berat dan lebih kompleks. Hal ini merupakan akibat daripada perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara yang pesat. Sebagai seorang pendidik bertanggung jawab serta mengetahui tugas dan amanahnya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, pendidik harus berperan secara aktif untuk mengikuti program pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan dan ditempuh guru agama Islam di Malaysia untuk meningkatkan profesionalisme keguruan (Sang, 1996: 215):

1) Kursus peningkatan profesionalisme keguruan

Peranan guru di Malaysia sekarang lebih luas. Tidak seperti yang dulu hanya berperan sebagai penyampai ilmu saja. Melainkan sekarang guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator serta pemberi rangsang di dalam kelas. Bahwa perubahan peranan guru diiringi dengan perubahan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan ini hendaklah guru mengikuti kursus-kursus pendidikan yang diadakan oleh pihak

Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, misalnya Kursus Dalam Perkhidmatan atau Kursus Peningkatan Profesionalisme. Adapun dua jenis latihan dalam LDP yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai berikut (Ali, 2001: 22-23):

a) Latihan jangka panjang

Latihan jangka panjang merupakan salahsatu jenis pelatihan atau pembinaan yang diadakan oleh kementerian pendidikan di Malaysia. Latihan jenis ini dilakukan dengan waktu/masa yang panjang. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan yaitu kursus dalam liburan, kursus akhir pekan, dan kursus induksi.

b) Latihan jangka pendek

Latihan jangka pendek merupakan latihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan bagi guru dalam jabatan untuk meningkatkan profesionalisme dalam jangka pendek. Adapun jenis-jenis kegiatan latihan jangka pendek yaitu *In-house training*, Bengkel/ diskusi, seminar, ceramah, Latihan Dalam Kumpulan (LDK), Latihan bina semangat.

Adapun jenis kursus yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dalam Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sebagai berikut:

a) Kursus ikhtisas/profesional.

Kursus ikhtisas/profesional merupakan salahsatu kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme keguruan karena dapat membantu dan mendorong guru untuk menyampaikan pengajaran ke peserta didik. Adapun fokus kursus yang diadakan yaitu kursus bahasa, pedagogi, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dan lain sebagainya.

b) Kursus pengurusan sekolah.

Kursus pengurusan sekolah merupakan kursus kepemimpinan serta pengurusan organisasi sekolah. Adapun fokus kursus yang diadakan yaitu kursus untuk Guru Besar/ Kepala sekolah dan Guru Penolong Kanan (GPK).

c) Kursus IT

Kursus IT merupakan kursus yang diadakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang teknologi. Adapun beberapa kursus yang diadakan yaitu multimedia, komputer, dan teknologi pendidikan.

2) Penyelidikan dan penulisan

Konteks perkembangan profesionalisme keguruan salah satu usaha utama yaitu dengan meningkatkan teknik pengajaran di dalam kelas. Hal ini guru harus senantiasa berusaha untuk membawa perubahan dan menyesuaikan teknik pengajaran dan

pembelajaran demi meningkatkan prestasi dan memberi perkhidmatan yang bermutu sesuai dengan profesi mereka. Usaha ini bisa dilaksanakan dengan beberapa cara seperti menjalankan **penelitian** terhadap aktivitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, menggunakan **teknik refleksi**, dan menguasai kemampuan penilaian **kendiri** (konsep diri) untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah.

3) Pendidikan ke arah perkembangan sendiri

Pendidikan ke arah perkembangan sendiri (konsep diri) sangatlah penting untuk meningkatkan profesionalisme dalam keguruan. Karena dengan adanya perkembangan sendiri guru dapat menilai, mengukur atau mempertimbangkan tentang mutunya sebagai profesi keguruan. Maka nilai-nilai diri merangkum unsur-unsur pertimbangan seseorang individu seperti kemampuan, kebaikan, pengetahuan, potensi, bakat, kepercayaan, kecakapan, sikap, emosi, jasmani dan tingkah laku.

Nilai moral yang baik, adil dan yang diinginkan dapat dibentuk dengan berbagai cara yaitu melalui contoh teladan, norma, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat, peraturan dan undang-undang, sanksi serta pendidikan. Nilai-nilai individu biasanya dibina dari pengala-man-pengalaman yang dialaminya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu nilai-nilai diri senantiasa berubah mengikuti peredaran masa.

Berdasarkan di atas, perkembangan sendiri dapat disamakan sebagai perkembangan potensi diri dari segi intelek, sosial, rohani dan jasmani. Usaha memperkembangkan potensi pada diri tidak saja bergantung pada sikap positif individu, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang lain seperti kemampuan belajar, kemampuan berfikir, kemampuan sosial, kemampuan komunikasi, serta kemampuan menangani masalah dan tantangan. Oleh karena itu guru harus menguasai kemampuan-kemampuan ke arah perkembangan sendiri. Usaha ini akan dapat mengembangkan potensi diri guru, meningkatkan statusnya sebagai profesional dalam arti sebenarnya, menjalankan tugas dengan baik dan penuh keyakinan serta dapat mencapai prestasi yang tinggi.

4) Perkembangan pendidikan terkini

Perkembangan sains dan teknologi semakin pesat dan canggih. Khususnya penciptaan alat media elektronik dan komputer serta berbagai jenis pendidikan telah diperkenalkan untuk kegunaan institusi-institusi pendidikan demi menyambut tuntutan serta tantangan masa depan. Di antara jenis-jenis pendidikan baru diperkenalkan yaitu pendidikan jarak jauh, pendidikan komputer, pendidikan ter-buka, pendidikan radio dan televisi, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pendidikan terkini akan memudahkan pendidik dan peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Apabila guru menggunakan pendidikan

sesuai perkembangan pendidikan terkini menjadikan guru akan berkembang profesi keguruan.

a) Pendidikan jarak jauh (*Distant Education*)

Pendidikan jarak jauh juga dikenali sebagai pendidikan melalui media, pendidikan komunikasi atau pendidikan melalui siaran. Pendidikan jarak jauh ini biasanya dikendalikan dengan dua cara sebagai berikut:

- (1) Pendidikan menggunakan berbagai jenis alat penghantar seperti radio, televisi satelit, dengan ini guru dapat menyampaikan pelajaran tanpa bertatap muka dengan peserta didik.
- (2) Penggunaan bahan-bahan pelajaran dalam bentuk bercetak, rekaman pita, rekaman video atau menyediakan program dalam disket komputer ke pusat sumber untuk dipinjam oleh peserta didik. Dengan penggunaan komputer yang semakin canggih, pelajar dapat dilatih melalui program CAL (*Computer Assisted Learning*) di rumahnya.

Dengan adanya alat bantu untuk pendidikan akan mempermudah peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran apabila berhalangan hadir dengan alasan tertentu. Dengan kata lain sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan pendidikan formal.

b) Pendidikan terbuka (*Open Education*)

Pendidikan terbuka merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, pendidikan ini disebut juga pendidikan masyarakat. Pendidikan jenis ini tidak perlu didaftarkan sebagai pelajar. Segala aktivitas pendidikan dilakukan di tempat-tempat bekerja atau di rumah. Terdapat berbagai jenis Pendidikan Terbuka yang dikelola oleh kerajaan atau badan-badan swasta. Diantaranya adalah Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Kompu-ter, dan Pendidikan Universitas Terbuka.

c) Pendidikan radio dan televisi

Program pendidikan melalui radio dan televisi dikendalikan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Program pendidikan ini bukan saja hanya untuk peserta didik menguasai kemampuan dan memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan, tetapi digunakan oleh guru untuk melengkapinya kekurangan mereka dari segi rancangan dan pengajarannya maupunalat bantu mngajar. Melalui pendidikan jenis ini banyak orang dewasa mendapat pendidikan profesional seperti pendidikan guru dan vokasional.

d) Penggunaan komputer dalam pendidikan

Penggunaan komputer dalam pendidikan telah membawa banyak perkembangan dalam sistem pendidikan yang semakin canggih. Penggunaan komputer dalam pendidikan juga membawa reformasi serta perkembangan baru dalam berbagai bidang pendidikan, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori pengajaran dan pembelajaran, pengurusan sekolah, serta kemampuan dan pelatihan guru. Di Malaysia penggunaan komputer dalam bidang pendidikan semakin meningkat. Bahkan dalam dekade 70-an, komputer telah digunakan secara meluas untuk pemeriksaan kertas jawaban. Di peringkat sekolah komputer diperkenalkan dalam dekade 80-an.

Selain strategi di atas, terdapat strategi lain untuk meningkatkan profesionalisme keguruan yaitu observasi. Yang dimaksud dengan observasi yaitu memperhatikan sesuatu dengan pancaindera. Dalam konteks pendidikan, observasi adalah serupa dengan pengawasan. Observasi merupakan interaksi penilaian oleh seorang yang mempunyai kemampuan khusus, serta mempunyai pengalaman yang luas dalam pengajaran, seperti kepala sekolah, dosen, guru ahli, serta guru senior di sekolah. Tujuan observasi adalah untuk membimbing guru yang menyangkut pencapaian kualitas dan prestasi pengajaran yang tinggi (Sang, 2000: 33). Pendapat lain mengenai strategi pembinaan observasi

menurut Ali (2001: 23) definisi observasi yaitu, “suatu proses di mana guru pelatih akan diawasi dan dinilai oleh guru pembimbing atau pensyarah dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P)”.

Latihan Guru Berterusan. Latihan guru berterusan diadakan bagi guru dalam jabatan. Latihan Guru Berterusan adalah latihan yang diberikan pada guru semasa guru tersebut menjalani kursus dalam jabatan. Dengan program ini guru dilatih untuk meningkatkan pengetahuan, metode pembelajaran, serta memantapkan nilai-nilai yang baru secara berkelanjutan (Saad, 1992: 94).

Bergantinya kurikulum di Malaysia dari Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) menjadi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Maka peserta didik melibatkan dirinya untuk mengikuti pelayanan masyarakat (*khidmat komuniti*). Sebagaimana pergantian kurikulum tersebut, dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam akan diperkuat dengan pendidikan yang fokus pada pemahaman tentang nilai-nilai hubungan baik sesama manusia. Dengan ini Guru Pendidikan Islam (GPI) akan mendapatkan pelatihan untuk mengimplementasi KBSM dan KSSM, agar kurikulum ini tercapai (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013: 16).